

PENGADILAN AGAMA METRO

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2018

Jl. Stadion 24B, Tejoagung, Metro Timur

Metro - Lampung 34102

Telp. 0725-45068 Fax. 0725-45068

e-mail : pametro_lampung@yahoo.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA METRO

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Stadion 24B, Tejoagung, Metro Timur

Telp. 0725-45068 Fax. 0725-45068

Metro - Lampung 34102

e-mail : pametro_lampung@yahoo.com

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Metro adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Metro mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Metro. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Metro, 31 Desember 2018
Kepala Pengguna Anggaran,

BUNYAMIN, S.Ag

NIP. 19680401 199203 1 004

Pengadilan Agama Metro

Jl. Stadion 24B, Tejoagung, Metro Timur Metro - Lampung 34102

Telp. 0725-45068 Fax. 0725-45068 e-mail :

pametro_lampung@yahoo.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Metro telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Metro, 31 Desember 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,

BUNYAMIN, S.Ag

NIP. 19680401 199203 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca.....	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	7
A. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Metro	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.....	24
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	38
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	45
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	50

Lampiran dan Daftar

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Metro Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 .

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 28.512.702 atau mencapai 2.851.27 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 1.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.7.848.225.418 atau mencapai 99.92 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7.795.349.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 15.711.755.746 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 2.429.050; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 15.709.326.696; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 21.201.132 dan Rp. 15.690.554.614

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsure pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasional, surplus/deficit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 14.757.503 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 7.228.525.712 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 7.213.768.209. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 13.936.105 dan sebesar Rp. 0, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. 7.199.832.104

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp. 15.187.967.285 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. 7.199.832.104 ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 7.819.712.002 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp. 15.690.554.614

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA METRO LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2018		%	31 Desember 2017
		ESTIMASI / ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.000.000	28.512.708	2851,27	9.825.979
JUMLAH PENDAPATAN		1.000.000	28.512.708	2851,27	9.825.979
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	5.975.960.000	5.975.485.806	99,99	5.233.061.875
Belanja Barang	B.4	787.179.000	781.825.268	99,32	669.653.314
Belanja Modal	B.5	1.091.000.000	1.090.914.344	99,99	4.899.913.650
JUMLAH BELANJA		7.854.139.000	7.848.225.418	99,92	10.802.628.839

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**PENGADILAN AGAMA METRO
NERACA
PER 31 Desember 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	2.078.050	1.761.750
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	351.000	280.000
Persediaan Belum Diregister	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		2.429.050	2.041.750
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	5.829.194.000	5.829.194.000
Peralatan dan Mesin	C.15	1.568.731.715	1.405.099.365
Gedung dan Bangunan	C.16	9.518.570.789	8.631.762.650
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	397.959.000	397.959.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	3.633.478	3.633.478
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(1.608.762.286)	(1.074.602.399)
Jumlah Aset Tetap		15.709.326.696	15.193.046.094
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	20.750.000	20.750.000
Aset Lain-Lain	C.22	141.212.650	113.884.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(161.962.650)	(134.634.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		15.711.755.746	15.195.087.844
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	19.123.082	5.358.809
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	2.078.050	1.761.750
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		21.201.132	7.120.559
JUMLAH KEWAJIBAN		21.201.132	7.120.559
EKUITAS			
Ekuitas	C.27	15.690.554.614	15.187.967.285
JUMLAH EKUITAS		15.690.554.614	15.187.967.285
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		15.711.755.746	15.195.087.844

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**PENGADILAN AGAMA METRO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	14.757.503	8.425.979
JUMLAH PENDAPATAN		14.757.503	8.425.979
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	5.981.892.994	5.234.003.497
Beban Persediaan	D.3	53.118.600	32.752.100
Beban Barang dan Jasa	D.4	435.957.989	443.231.300
Beban Pemeliharaan	D.5	193.197.536	127.541.607
Beban Perjalanan Dinas	D.6	107.017.420	68.991.219
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	457.341.173	321.099.147
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		7.228.525.712	6.227.618.870
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(7.213.768.209)	(6.219.192.891)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		610.000	1.400.000
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		14.799.355	1.878.300
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.473.250	1.075.200
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		13.936.105	2.203.100
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(7.199.832.104)	(6.216.989.791)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(7.199.832.104)	(6.216.989.791)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**PENGADILAN AGAMA METRO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2018 DAN 2017***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017
EKUITAS AWAL	E.1	15.187.967.285	5.247.491.253
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(7.199.832.104)	(6.216.989.791)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	5.294.071.862
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	(117.292.569)	25.336.400
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	-	254.701
JUMLAH		(117.292.569)	5.319.662.963
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	7.819.712.002	10.837.802.860
EKUITAS AKHIR	E.5	15.690.554.614	15.187.967.285

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Metro

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Visi Pengadilan Agama Metro adalah Pengadilan Agama Metro mengusung cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Mahkamah Agung yakni TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA METRO YANG AGUNG dengan menuangkan dalam visi Pengadilan Agama Metro sebagai berikut:

Misi Pengadilan Agama Metro adalah Pengadilan Agama Metro menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Metro.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Metro menetapkan tujuan strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Metro yang professional, bersih dari KKN, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Metro.
4. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hokum kepada masyarakat pencari keadilan.

Lalu dari tujuan strategis di atas ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.

2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan 31 Desember 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Metro. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Agama Metro menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis

kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Agama Metro dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 31 Desember 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Agama Metro. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
-LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
-LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara

pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan

sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan

minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara

berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka

panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

B.1 Pendapatan

Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada

Rp. 28.512.708 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 28.512.708 atau mencapai 2851.27 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.1.000.000 Pendapatan Pengadilan Agama Metro terdiri dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang lalu serta Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	610.000	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan bangunan	-	4.510.043	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang lalu	-	13.145.205	
Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji	1.000.000	10.247.460	1.024,75
Jumlah	1.000.000	28.512.708	2.851,27

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 190,18 % dibandingkan per 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan karena kenaikan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2018	REALISASI 31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	28.512.708	9.825.979	190,18
Jumlah	28.512.708	9.825.979	190,18

*Realisasi
Belanja*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Negara pada per 31 Desember 2018

Negara Rp. 7.848.225.418 adalah sebesar Rp. 7.848.225.418 atau 99,92% dari 7.848.225.418 anggaran belanja sebesar Rp. 7.854.139.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
31 Desember 2018*

Uraian	TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	5.975.960.000	5.975.485.806	99,99
Belanja Barang	787.179.000	781.825.268	99,32
Belanja Modal	1.091.000.000	1.090.914.344	99,99
Total Belanja Kotor	7.854.139.000	7.848.225.418	99,92
Pengembalian	-	(708)	-
Jumlah	7.854.139.000	7.848.224.710	99,92

Dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami penurunan sebesar 27,36 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya jumlah pegawai Pengadilan Agama Metro, dan
2. Menurunnya jumlah Pagu Anggaran Belanja Modal;

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2017

URAIAN	TA 2018	TA 2017	NAIK (TURUN)
Belanja Pegawai	5.975.485.806	5.233.094.360	14,19
Belanja Barang	781.825.268	669.653.314	16,75
Belanja Modal	1.090.914.344	4.901.270.650	(77,74)
Jumlah	7.848.225.418	10.804.018.324	(27,36)

Belanja
Pegawai Rp.
5.975.485.806

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.5.975.485.806 dan Rp.5.233.094.360. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 14,19% dari 31 Desember 2017.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	TA 2018	TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	2.283.236.800	2.024.030.800	12,81
Belanja Pembulatan Gaji PNS	35.305	29.023	21,64
Belanja Tunj. Suami Istri PNS	164.105.554	140.297.890	16,97
Belanja Tunj. Anak PNS	50.556.094	46.411.716	8,93
Belanja Tunj. Struktural PNS	37.080.000	28.320.000	30,93
Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.588.420.000	2.244.755.000	15,31
Belanja Tunj. PPh PNS	336.234.573	297.780.611	12,91
Belanja Tunj. Beras PNS	115.437.480	108.340.320	6,55
Belanja Uang Makan PNS	381.535.000	334.149.000	14,18
Belanja Tunj Umum PNS	18.845.000	8.980.000	109,86
Belanja Uang Lembur PNS	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	5.975.485.806	5.233.094.360	14,19
Pengembalian Belanja Pegawai	(708)	(32.485)	(97,82)
Jumlah Belanja	5.975.485.098	5.233.061.875	14,19

Belanja
Barang Rp.
781.825.268

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 781.825.268 dan Rp. 669.653.314. Realisasi belanja barang 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 16,75% dari realisasi belanja barang 31 Desember 2017. Hal ini antara lain

disebabkan oleh meningkatnya Pagu belanja barang serta harga barang yang mulai meningkat dan banyaknya kebutuhan kantor yang harus direalisasikan.

*Perbandingan Belanja Barang
TA 2018 dan TA 2017*

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	323.437.352	345.011.726	(6,25)
Belanja Barang Non Operasional	6.019.700	22.952.600	(73,77)
Belanja Barang Persediaan	85.671.250	53.242.500	60,91
Belanja Jasa	99.144.560	73.272.162	35,31
Belanja Pemeliharaan	160.534.986	106.183.107	51,19
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	107.017.420	68.991.219	55,12
Jumlah Belanja Kotor	781.825.268	669.653.314	16,75
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	781.825.268	669.653.314	16,75

Belanja Modal

Rp.

1.090.914.344

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.090.914.344 dan Rp. 4.899.913.650. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 74,40% dibandingkan 31 Desember 2017 disebabkan oleh turunnya jumlah pagu anggaran belanja modal pada tahun ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

TA 2018 dan TA 2017

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.961.000	398.200.000	(52,04)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	899.953.344	4.498.070.650	(79,99)
Belanja Modal Lainnya (anti Virus)	0	5.000.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	1.090.914.344	4.901.270.650	(77,74)
Pengembalian	0	-1.357.000	(100,00)
Jumlah Belanja	1.090.914.344	4.899.913.650	(77,74)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2018 dan TA2017*

Keterangan	TA 2018	TA 2017
Uang Tunai	-	-
BRI Cabang Metro A/C 00000130.01.000084.30.8	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp. 0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0. Kantor Pengadilan Agama Metro tidak mempunyai rekening Bendahara Penerimaan. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
TA 2018 dan TA2017*

Keterangan	TA 2018	TA 2017
Uang Tunai	-	-
Uang di Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp.0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal TA2018 dan TA2017 masing-masing sebesar Rp. 2.078.050 dan Rp. 1.761.750

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
TA 2018 dan TA 2017*

Keterangan	TA 2018	TA 2017
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2.078.050	1.761.750
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	2.078.050	1.761.750

*Piutang PNB
Rp. 0*

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0. dan Rp. 0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP per TA2018 dan TA2017

Uraian	TA 2018	TA 2017
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tagihan **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

TP/TGR Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rp. 0

Bagian Lancar TPA **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Rp. 0 Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp.0.

Rp. 0 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor.

Belanja
Dibayar di
Muka Rp. 0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp.0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017*

Jenis	TA 2018	TA 2017
Persekot/ Uang muka gaji	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp. 0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan Rp.
351.000

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.351.000 dan Rp.280.000.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018

dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 31 Desember 2018 dan TA 2017

Jenis	TA 2018	TA 2017
Barang Konsumsi	351.000	280.000
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Jumlah	351.000	280.000

*Tagihan
TP/TGR
Rp. 0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp. 0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Per 31 Desember 2018 dan TA 2017 adalah

Panjang
Rp. 0

masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah
Rp.5.829.194.
000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Agama Metro per 31 Desember 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 5.829.194.000 dan Rp. 5.829.194.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	5.829.194.000
Mutasi tambah :	0
Mutasi kurang :	0
Saldo per 31 Desember 2018	5.829.194.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah 31 Desember 2018

No	Luas	Peruntukan	Nilai
1	355 m2	Rumah Dinas PA Metro	494.831.000
2	5315 m2	Gedung Kantor PA Metro	5.334.363.000
Jumlah			5.829.194.000

Peralatan dan
Mesin Rp.
1.568.731.715

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan TA 2017 adalah Rp. 1.568.731.715 dan Rp. 1.405.099.365. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi tambah :	190.961.000
- Pembelian Lemari Besi/Metal	8.910.000
- Pembelian Meja Kerja Kayu	22.880.000
- Pembelian Kursi Besi/Metal	37.620.000
- Pembelian Sice	6.490.000
- Pembelian Kasur/Spring Bed	6.171.000
-Pembelian Kursi Dorong	990.000
-Pembelian Laptop	65.000.000
- Pembelian A.C Split	42.900.000
Mutasi kurang :	27.328.650
- Penghentian Aset dari Penggunaan	27.328.650
Saldo per 31 Desember 2018	1.568.731.715
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	-1.083.758.454
Nilai Buku per 31 Desember 2018	484.973.261

Rincian asset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp.
9.120.729.179*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan TA 2017 adalah Rp. 9.120.729.179 dan Rp. 8.631.762.650. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	8.631.762.650
Mutasi tambah :	1.799.984.344
- Reklasifikasi Masuk	900.031.000
- Pengembangan Melalui KDP	899.953.344
Mutasi kurang :	913.176.205
- Koreksi Pencatatan Nilai Gedung Kantor	13.145.205
- Reklasifikasi Keluar	900.031.000
Saldo per 31 Desember 2018	9.518.570.789
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2018	(397.841.610)
Nilai Buku per 30 Juni 2018	9.120.729.179

Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 397.959.000

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 397.959.000 dan Rp. 397.959.000.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	397.959.000
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2018	397.959.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	(127.162.222)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	270.796.778

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya Rp. 3.633.478

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan TA 2017 adalah Rp. 3.633.478 dan Rp. 3.633.478. Aset tetap tersebut berupa bahanperpustakaantercetak. Sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	3.633.478
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2018	3.633.478
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	0
Nilai Buku per 31 Desember 2018	3.633.478

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang tidak digunakan
Rp.
141.212.650

C.19 Aset Tetap yang tidak digunakan

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan TA 2017 adalah Rp. 141.212.650 dan Rp. 113.884.000. Aset tetap tersebut berupa bahanperpustakaantercetak. Sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	113.884.000
Mutasi tambah:	27.328.650
- Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lain	27.328.650
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2018	141.212.650
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-141.212.650
Nilai Buku per 31 Desember 2018	0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp. 0

C.20 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp.
1.074.602.399

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp. 1.074.602.399 dan Rp. 1.710.525.082.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
31 Desember 2018*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.568.731.715	1.083.758.454	484.973.261
2	Gedung dan Bangunan	9.518.570.789	397.841.610	9.120.729.179
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	397.959.000	127.162.222	270.796.778
4	Aset Tetap Lainnya	141.212.650	141.212.650	0
Jumlah		11.626.474.154	1.749.974.936	9.876.499.218

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak
Berwujud
Rp.20.750.000

C.22 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan TA 2017 adalah Rp. 20.750.000 dan Rp. 20.750.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Agama Metro berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 desember 2017	20.750.000
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2018	20.750.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2018	(20.750.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	0

Aset Lain-Lain
Rp.
141.212.650

C.23 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp. 141.212.615 dan Rp. 113.884.000.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	113.884.000
Mutasi tambah:	27.328.650
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain	27.328.650
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2018	141.212.650
Akumulasi Penyusutan	141.212.650
Nilai Buku per 31 Desember 2018	0

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini

Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp.
(161.962.960)

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing Rp. (161.962.960) dan Rp. (134.634.000).

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31

Desember 2018 adalah sebagai berikut :

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset
Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	20.750.000	20.750.000	0
Jumlah	20.750.000	20.750.000	0
Aset Lain-lain	141.212.650	141.212.650	0
Jumlah	161.962.650	161.962.650	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp.0*

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp.
19.123.082*

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp.19.123.082 dan Rp.5.358.809. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Listrik	6.897.675	Tagihan Bulan Desember 2017
Belanja Telepon	3.461.833	Tagihan Bulan Desember 2017
Belanja Speedy	1.064.056	Tagihan Bulan Desember 2017
Belanja Gaji Pokok PNS	556.500	Kenaikan Pangkat 1 orang PNS
Belanja Tunjangan Anak PNS	22.260	Kenaikan Pangkat 1 orang PNS
Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS	55.650	Kenaikan Pangkat 1 orang PNS
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.600.000	Kenaikan Pangkat 1 orang PNS
Belanja PPh PNS	635.108	Kenaikan Pangkat 1 orang PNS
Belanja Uang Makan PNS	2.480.000	Tagihan Uang Makan Bulan Desember 2018
Belanja Keperluan Perkantoran (surat kabar)	350.000	Tagihan Bulan Desember 2017
Total	19.123.082	-

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp. 0*

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Ekuitas
Rp.
15.690.554.61
4*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.690.554.614 dan Rp. 15.187.967.285 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP Rp.
14.757.503*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 14.757.503 dan Rp. 8.425.929. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2018
dan 31 Desember 2017*

URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.510.043	1.134.096	297,68
Persekot / Uang Muka Gaji	10.247.460	7.291.833	40,53
Jumlah	14.757.503	8.425.929	75,14

*Beban
Pegawai Rp.
5.981.893.702*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.981.893.702 dan Rp. 5.234.035.982.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2018 dan TA 2017

URAIAN	TA 2018	TA 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	2.282.967.700	2.024.856.400	12,75
Beban Pembulatan Gaji PNS	34.159	28.976	17,89
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	164.078.644	140.380.450	16,88
Beban Tunj. Anak PNS	50.545.330	46.444.740	8,83
Beban Tunj. Struktural PNS	37.080.000	28.320.000	30,93
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.592.020.000	2.244.755.000	15,47
Beban Tunj. PPh PNS	336.869.681	297.780.611	13,13
Beban Tunj. Beras PNS	115.437.480	108.340.320	6,55
Beban Uang Makan PNS	384.015.000	334.117.000	14,93
Beban Tunjangan Umum PNS	18.845.000	8.980.000	109,86
Beban Uang Lembur	0	0	-
Jumlah	5.981.892.994	5.234.003.497	14,29

Beban

D.3 Beban Persediaan

*Persediaan Rp.
53.118.600*

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar 53.118.600 dan Rp. 32.752.100. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017*

URAIAN	TA 2018	TA 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	53.118.600	32.752.100	62,18
Jumlah	53.118.600	32.752.100	62,18

Beban Barang dan Jasa Rp. 435.957.989

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 435.957.989 dan Rp. 443.231.300. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena tidak adanya beban penambah daya tahan tubuh sampai dengan bulan Desember 2018.

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2018	TA 2017	NAIK (TURUN) %
Beban keperluan perkantoran	280.897.908	260.170.051	7,97
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	10.797.500	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas	2.071.500	1.198.750	72,81
Beban honor operasional satker	39.000.000	45.000.000	(13,33)
Beban barang operasional lainnya	1.500.000	33.240.425	(95,49)
Beban bahan	1.722.200	18.472.600	(90,68)
Beban barang non operasional lainnya	4.297.500	4.480.000	(4,07)
Beban Langganan Listrik	91.579.878	57.402.585	59,54
Beban Langganan Telepon	14.889.003	12.469.389	19,40
Jumlah	435.957.989	443.231.300	(1,64)

Beban Pemeliharaan Rp. 193.197.536

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 193.197.536 dan Rp. 127.541.607. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang

sudah ada ke dalam kondisi normal. kenaikan beban pemeliharaan karena meningkatnya jumlah pagu anggaran yang digunakan untuk renovasi gedung kantor. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2018	TA 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	102.031.500	49.236.800	107,23
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	58.503.486	49.446.627	18,32
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	7.499.680	(100,00)
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	32.662.550	21.358.500	52,93
Jumlah	193.197.536	127.541.607	51,48

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp.
107.017.420*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 107.017.420 dan Rp. 68.991.219. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh turunnya jumlah Undangan dan konsultasi yang dibebankan pada DIPA kantor.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2018	TA 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	93.887.420	55.791.219	68,28
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.130.000	13.200.000	(0,53)
Jumlah	107.017.420	68.991.219	55,12

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp. 0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Dalam hal ini, Kantor Pengadilan Agama Metro tidak mempunyai beban untuk diserahkan pada masyarakat.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2018	TA 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	-
Jumlah	0	0	-

*Beban
Bantuan
Sosial Rp. 0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Kantor Pengadilan Agama Metro tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan karena tidak ada pagu anggaran untuk beban bantuan sosial.

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.
457.341.173*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 457.341.173 dan Rp. 321.099.147.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2018	TA 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	177.086.062	122.730.862	44,29
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	197.787.363	141.590.277	39,69
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	79.658.250	53.647.125	48,49
Beban Penyusutan Irigasi dan Jaringan	2.809.498	3.130.883	
Jumlah Penyusutan	457.341.173	321.099.147	42,43

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp. 0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2018	TA 2017	NAIK (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	-
Jumlah	0	0	-

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.
13.936.105*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional periode per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 13.936.105 dan Rp. 2.203.100. Rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional Periode per 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017*

URAIAN	TA 2018	TA 2017	NAIK (TURUN)
Pendapatan dari pelepasan Aset Non Lancar	610.000	1.400.000	-
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	14.799.355	1.878.300	-
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	-1.473.250	-1.075.200	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	13.936.105	2.203.100	-

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).*

Pos Luar Biasa **D.12 Pos Luar Biasa**

Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Pos Luar Biasa sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	TA 2018	TA 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal **E.1 Ekuitas Awal**

Rp.

15.187.967.285

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.187.967.285 dan Rp. 5.247.491.253.

Defisit LO **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Rp.7.199.832.104

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar

Rp. 7.199.832.104 dan Rp. 6.216.989.791. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp. 0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp. 0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp.0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan

Rp. 5.294.071.862.

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp.
(117.292.569)*

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. (117.292.569) dan Rp. 25.336.400. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31
Desember 2018*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(117.292.569)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0
Jumlah	(117.292.569)

*Koreksi Lain-
Lain Rp. 0*

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 254.701. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Jumlah	0

Transaksi Antar
Entitas Rp.
7.819.712.002

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.819.712.002 dan Rp. 10.837.802.860. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	7.848.224.710
Diterima Dari Entitas Lain	(28.512.708)
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	7.819.712.002

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari
Entitas lain Rp.
(28.512.708)
dan Ditagihkan
ke Entitas lain
Rp.
7.848.224.710.

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2018, DDEL sebesar (Rp. 28.512.708) sedangkan DKEL sebesar Rp. 7.848.224.710.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer
masuk Rp. 0 dan
Transfer

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

KeluarRp. 0

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	0	0
2	Persediaan	0	0
	Jumlah	0	0

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

*Pengesahan Hibah
LangsungRp.
0*

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0.

*Pengembalian
Pengesahan Hibah
LangsungRp. 0*

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp. 0.

*Ekuitas Akhir
Rp.
15.690.554.614*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.690.554.614 dan Rp. 15.187.967.285.

F.PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian yang penting apapun setelah tanggal neraca di satuan Kerja Pengadilan Agama Metro untuk periode per 31 Desember 2018 yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN :

F.2.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut BPK pada periode 31 Desember 2018.

F.2.2 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Metro adalah:

- BRI CABANG METRO A/C 00000130.01.000084.30.8 an. BPg 126 PA Metro 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA MARI dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0.

F.2.3 Revisi DIPA

Pada Periode yang berakhir 31 Desember 2018 Satuan Kerja Pengadilan Agama Metro terdapat revisi DIPA sebagai berikut :

1. Revisi ke-1, tanggal 25 Juli 2018 terdapat pergantian Nama PPSPM dari an. WINARTI, S.H.I menjadi ABDUL WAHID AZIZ, S.Kom serta adanya perubahan nilai pada

- Rencana Penarikan Dana dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018.
2. Revisi ke-2, tanggal 27 September 2018, terdapat perubahan nilai pada Rencana Penarikan Dana dari bulan Juli sampai dengan Desember 2018.
 3. Revisi ke-3, tanggal 02 Oktober 2018, terdapat perubahan nilai pada Rencana Penarikan Dana dari bulan Juli sampai dengan Desember 2018 dan terdapat perubahan nilai pada Belanja Barang pada Layanan Operasional dan Pemeliharaan kantor dari Rp. 656.051.000,- menjadi Rp. 788.233.000,-.
 4. Revisi ke-4, tanggal 23 Oktober 2018, terdapat perubahan nilai pada Rencana Penarikan Dana dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018.
 5. Revisi ke-5, tanggal 19 November 2018, terdapat perubahan nilai pada Rencana Penarikan Dana dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018 dan terdapat perubahan nilai pada Belanja Pegawai dari Rp. 6.048.298.000,- menjadi Rp. 6.096.679.000,-
 6. Revisi ke-6, tanggal 28 November 2018, terdapat perubahan nilai pada Rencana Penarikan Dana dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018
 7. Revisi ke-7, tanggal 21 Desember 2018, terdapat perubahan nilai pada Rencana Penarikan Dana bulan Desember 2018 dan terdapat perubahan nilai pada Belanja Pegawai dari Rp. 6.096.679.000,- menjadi Rp. 5.991.760.000,-
 8. Revisi ke-8, tanggal 21 Desember 2018, terdapat perubahan nilai pada Rencana Penarikan Dana dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018, terdapat perubahan nilai pada Belanja Pegawai dari Rp. 5.991.760.000,- menjadi Rp. 5.975.960.000,- dan terdapat perubahan nilai pada Belanja Barang pada

Layanan Operasional dan Pemeliharaan kantor dari Rp. 788.233.000,- menjadi Rp. 787.179.000,-

F. 2.4 Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Terdapat ralat mengenai SPM, SP2D, SSBP dan SSPB Pada Periode yang berakhir 31 Desember 2018 di Satuan Kerja Pengadilan Agama Metro yaitu :

- Nomor SPM : 00018 tanggal 07 Desember 2018 dan telah diterbitkan SP2D nomor 181261301008538, tanggal 10 Desember 2018 senilai SP2D Rp. 8.465.455,- terdapat koreksi uraian SPM dari "Pembayaran Belanja Barang Termin ke-III sesuai Kontrak No. W8-A2/360/PL.08/I/2018 tanggal 24 Januari BAP No. W8-A2/2462/PL.08/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 dan sesuai SPP No. 018 tanggal 07 Desember 2018" yang seharusnya "Pembayaran Belanja Barang Termin ke-III sesuai Kontrak No. W8-A2/360/PL.08/I/2018 tanggal 24 Januari BAP No. W8-A2/2462/PL.08/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018, BAST Nomor W8-A2/2461/PL.08/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 dan sesuai SPP No. 018 tanggal 07 Desember 2018".

F.2.5 Catatan Penting Lainnya

- Tidak terdapat catatan penting pada kantor Pengadilan Agama Metro untuk periode 31 Desember 2018 yang dapat diungkapkan pada Laporan keuangan ini.

PENGADILAN AGAMA METRO
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018

No	Aset Tetap	Kuantitas	Nilai Perolehan	Akm. Peny. Per 31 Desember 2018	Beban Peny. per 31 Desember 2018	Akm. Peny. Per 31 Desember 2018	Nilai Buku Per 31 Desember 2018
A	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Bantu	2	17.661.100	13.994.435	2.444.444	16.438.879	1.222.221
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	2	182.164.117	182.164.117	-	182.164.117	-
3	Alat Kantor	23	100.424.401	98.025.717	7.327.778	78.024.845	22.399.556
4	Alat Rumah Tangga	225	704.503.097	310.799.747	92.597.100	403.396.847	301.106.250
5	Alat Komunikasi	15	26.010.000	21.380.000	1.990.000	23.370.000	2.640.000
7	Alat Kedokteran	1	990.000	-	198.000	198.000	792.000
8	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	2	21.340.000	1.422.668	1.422.668	2.845.336	18.494.664
9	Alat Khusus Kepolisian	1	5.500.000	1.375.000	1.375.000	2.750.000	2.750.000
10	Komputer Unit	30	419.547.000	247.307.358	49.741.072	297.048.430	122.498.570
11	Peralatan Komputer	15	90.560.000	57.500.000	19.990.000	77.490.000	13.070.000
12	Peralatan Olahraga	1	32.000	32.000	-	32.000	-
	Jumlah		1.568.731.715	934.001.042	177.086.062	1.083.758.454	484.973.261
B	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	10	8.320.882.789	77.161.701	160.296.998	341.606.063	7.979.276.726
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3	707.951.000	12.011.018	24.022.036	36.033.054	671.917.946
3	Tugu/Tanda Batas	3	489.737.000	6.734.164	13.468.329	20.202.493	469.534.507
	Jumlah		9.518.570.789	95.906.883	197.787.363	397.841.610	9.120.729.179
C	Jalan dan Jembatan						
1	Jalan	1	318.633.000	39.829.125	79.658.250	119.487.375	199.145.625
	Jumlah		318.633.000	39.829.125	79.658.250	119.487.375	199.145.625
D	Irigasi						
1	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	2	44.720.000	972.174	1.944.348	2.916.522	41.803.478
	Jumlah		44.720.000	972.174	1.944.348	2.916.522	41.803.478
E	Jaringan						
1	Jaringan Listrik	1	34.606.000	3.893.175	865.150	4.758.325	29.847.675
	Jumlah		34.606.000	3.893.175	865.150	4.758.325	29.847.675
F	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan						
1	Alat Kantor	90	36.243.650	8.915.000	-	36.243.650	-
2	Alat Rumah Tangga	72	16.846.000	16.846.000	-	16.846.000	-
3	Alat Komunikasi	2	52.000	52.000	-	52.000	-
4	Komputer Unit	9	87.121.000	87.121.000	-	87.121.000	-
5	Peralatan Komputer	1	950.000	950.000	-	950.000	-
	Jumlah		141.212.650	113.884.000	0	141.212.650	0
	Total		11.626.474.154	1.188.486.399	457.341.173	1.749.974.936	9.876.499.218

* Beban Amortisasi